



EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) YAYASAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG

Nisa Agnia¹, Resfi Asyifa², Alif Fadillah Himawan³, Shalbi Naila Makarim⁴, Ramaditya Rahardian⁵

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Humaniora,
Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia

Email: nisaagnia.ap@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the Free Nutritious Meals Program at the local level still faces complex problems, including service coverage that has only reached 17% of the target, cases of mass poisoning (164 students in September 2025), findings of rotten and maggot-infested food, disparities in access between schools, low competence of implementing staff in the fields of nutrition and food sanitation, and the dominance of administrative routines that reduce field officers' focus on the real needs of children as beneficiaries. This study analyzes the effectiveness of the implementation of the Free Nutritious Meals policy at the Nutrition Fulfillment Service Unit of the Muhammadiyah Pamulihan Association, Sumedang Regency, using a descriptive qualitative approach with Michael Lipsky's (2010) Street-Level Bureaucrats (SLB) theoretical framework. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, then analyzed using NVivo12. The results of the study show varying effectiveness in the four dimensions of Street-Level Bureaucrats (SLB): Rationing Service: Limitation of Access and Demand is moderately positive thanks to orderly criteria and distribution, while Inequality in Administration, Controlling Clients and the Work Situation, and Client Processing Mentality are moderately negative due to capacity imbalances, excessive administrative burdens, and the treatment of students as mere administrative objects. Overall, the implementation of the Free Nutritious Meals is quite effective but still fragile. The study recommends strengthening the competence of field officers, implementing a more humanistic service approach, and developing an integrated technology-based monitoring system to optimize program sustainability.

Keywords: *Free Nutritious Meals, Nutrition Fulfillment Service Units, Street-Level Bureaucrats, Policy Implementation, Effectiveness*

ABSTRAK

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat lokal masih menghadapi permasalahan kompleks, antara lain cakupan layanan yang baru mencapai 17% dari target, kasus keracunan massal (164 siswa pada September 2025), temuan makanan berbau busuk dan berulat,

ketimpangan akses antar sekolah, rendahnya kompetensi tenaga pelaksana di bidang gizi dan sanitasi pangan, serta dominasi rutinitas administratif yang mengurangi fokus petugas lapangan terhadap kebutuhan nyata anak sebagai penerima manfaat. Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Persyarikatan Muhammadiyah Pamulihan, Kabupaten Sumedang, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori Street-Level Bureaucrats (SLB) Michael Lipsky (2010). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan NVivo12. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang bervariasi pada empat dimensi SLB: *Rationing Service: Limitation of Access and Demand* bersifat *moderately positif* berkat kriteria dan distribusi yang tertib, sedangkan *Inequality in Administration, Controlling Clients and the Work Situation*, serta *Client Processing Mentality* bersifat *moderately negative* akibat ketimpangan kapasitas, beban administratif berlebih, dan perlakuan siswa sebagai objek administratif semata. Secara keseluruhan, implementasi MBG cukup efektif namun masih rapuh. Penelitian merekomendasikan penguatan kompetensi petugas lapangan, penerapan pendekatan pelayanan yang lebih humanis, serta pengembangan sistem monitoring terintegrasi berbasis teknologi untuk mengoptimalkan keberlanjutan program.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis, Satuan Layanan Pemenuhan Gizi, Implementasi Kebijakan, Efektivitas

PENDAHULUAN

Kesehatan dan gizi masyarakat menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah menjamin pemenuhan gizi harian peserta didik, terutama anak sekolah dan kelompok rentan, guna meningkatkan konsentrasi belajar, produktivitas, serta menurunkan angka stunting. Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan komitmen nasional untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat (Amril & Sazali, 2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025 menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Tujuannya menekan stunting, malnutrisi, dan kekurangan gizi mikro, sekaligus mendukung UMKM lokal sebagai pemasok bahan makanan. Program ini menjadi investasi SDM unggul untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui perluasan bertahap di seluruh tanah air. (BPPI Setpres, 2025).

Namun demikian, implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sumedang, masih penuh kendala. Cakupan program baru 17% dari target, dengan masalah utama berupa mutu dan keamanan pangan seperti temuan makanan busuk, ulat pada sayuran (Februari 2025), serta keracunan massal terhadap 164 siswa di tiga sekolah (September 2025) ditambah keterbatasan sumber daya manusia terlatih di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

(SPPG) yang banyak tidak memiliki latar belakang gizi atau sanitasi (Rachmawati, 2025).

Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bergantung pada desain kebijakan pusat, tetapi juga kesiapan pelaksana di daerah. Sebagai ujung tombak operasional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menghadapi hambatan signifikan berupa kekurangan tenaga kerja, kompetensi teknis, dan infrastruktur pendukung (Febryanti et al., 2025).

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah yang menginisiasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai kecamatan, salah satunya SPPG Persyarikatan Muhammadiyah Desa Pamulihan yang diresmikan pada 30 Juli 2025 dan kini melayani 1.665 penerima manfaat di 20 sekolah. SPPG berperan strategis sebagai “dapur gizi” yang memastikan distribusi, pengawasan mutu pangan, serta efektivitas implementasi kebijakan di lapangan dengan mengintegrasikan standar menu, hygiene, logistik, serta keterlibatan petani lokal, sekolah, dan komunitas. Keberhasilan SPPG tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang didistribusikan, tetapi juga konsistensi mutu gizi, keamanan pangan, dan kontinuitas layanan, meskipun pelaksana di lapangan masih terus memperluas jangkauan bagi penerima manfaat yang belum terakomodasi (Wijaya, 2025).

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamulihan, Kabupaten Sumedang, merupakan salah satu bentuk nyata kebijakan publik yang melibatkan interaksi langsung antara aparatur pemerintah dan masyarakat penerima manfaat, khususnya peserta didik di tingkat sekolah. Dalam implementasinya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan di tingkat pusat atau daerah, melainkan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan oleh para pelaksana di lapangan (Basit & Ramadani, 2025). Kondisi ini sejalan dengan teori *Street-Level Bureaucrats* (SLB) yang dikemukakan oleh Michael Lipsky (2010).

Teori *Street-Level Bureaucrats* dari Michael Lipsky (2010) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik lebih banyak ditentukan oleh perilaku dan keputusan birokrat tingkat lapangan (*street-level bureaucrats*) ketimbang rancangan kebijakan di tingkat atas. Pelaksana lapangan seperti tenaga SPPG, petugas gizi, dan koordinator memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam situasi nyata. Teori ini menganalisis efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui empat dimensi: (1) *Rationing Service: Limitation of Access and Demand*, yaitu pembatasan akses layanan akibat

keterbatasan sumber daya (membatasi jumlah penerima, memperketat syarat, atau menunda pelayanan); (2) *Rationing Service: Inequality in Administration*, yaitu ketidaksetaraan pemberian layanan antar kelompok masyarakat; (3) *Controlling Clients and The Work Situation*, yaitu upaya mengendalikan klien dan situasi kerja agar tetap tertib dan efisien; serta (4) *Client Processing Mentality*, yaitu kecenderungan memperlakukan penerima layanan sebagai “kasus administratif” semata, bukan individu dengan kebutuhan unik.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar Indonesia memiliki dampak positif namun menghadapi berbagai tantangan. Rahmah (2025) dalam *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* menemukan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan status gizi anak, kehadiran siswa, dan memberdayakan ekonomi lokal, meskipun terkendala distribusi tidak merata dan kurangnya koordinasi. Penelitian tersebut mengevaluasi efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar Indonesia melalui kajian pustaka kualitatif. Sejalan dengan itu, Agustini (2025) dalam *Jurnal Kiprah Pendidikan* menyatakan bahwa keberhasilan Makan Bergizi Gratis (MBG) bergantung pada koordinasi antar pemangku kepentingan, tetapi terhambat oleh ketidaksesuaian standar gizi dan lemahnya komunikasi di lapangan. Dalam penelitian ini mengkaji efektivitas dan tantangan MBG sebagai intervensi pendidikan di Indonesia dengan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen. Sementara itu, Yelvianti (2025) dalam *Jurnal Sehat Mandiri* menyoroti bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) mendukung gizi dan pendidikan, namun terkendala oleh infrastruktur penyimpanan yang terbatas dan kurangnya regulasi teknis. Penelitian tersebut untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui analisis konten kualitatif dan tinjauan literatur sistematis.

Penelitian terdahulu tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak membahas dampak nasional/regional secara kualitatif dengan fokus pada tantangan koordinasi, distribusi, dan standar gizi, namun jarang menggunakan teori Street-Level Bureaucrats untuk memahami peran petugas lapangan di tingkat lokal. Novelty penelitian ini adalah penerapan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis teori Street-Level Bureaucrats guna menganalisis efektivitas implementasi MBG di SPPG Pamulihan, Kabupaten Sumedang (wilayah pedesaan), khususnya pengaruh diskresi petugas lapangan (staf SPPG, guru, dan koordinator lokal) dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan geografis setempat. Pendekatan ini memberikan wawasan baru tentang dinamika implementasi kebijakan publik di tingkat mikro yang dapat

menjadi model bagi daerah pedesaan lain di Indonesia.

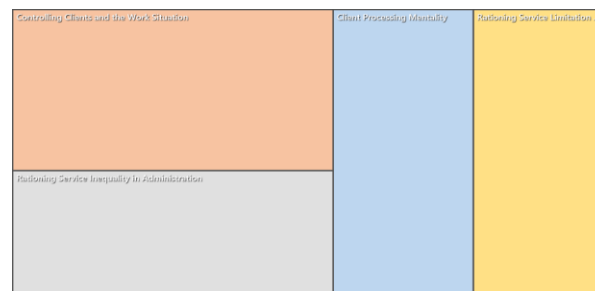
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari perspektif partisipan (Cresswell & Poth, 2018). Fokus penelitian adalah menggambarkan implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamulihan, Kabupaten Sumedang, serta mengeksplorasi persepsi efektivitasnya menurut pelaksana dan penerima manfaat. Penelitian ini berparadigma interpretatif yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi subjektif melalui interaksi dan pemaknaan individu, sehingga peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan penafsiran data (Neuman, 2014). Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (kepala SPPG, petugas gizi, aparatur pelaksana, dan penerima manfaat) serta data sekunder berupa dokumen resmi, pedoman teknis, laporan kegiatan, peraturan daerah, data statistik kesehatan, dan literatur relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, Wawancara Mendalam semi-terstruktur dengan dua informan kunci, yaitu Asisten Lapangan dan Pekerja Pemorsian SPPG Persyarikatan Muhammadiyah Pamulihan, untuk memperoleh data kaya mengenai pengalaman, pandangan, dan pemaknaan mereka terhadap implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua, Observasi Partisipatif yang melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan di SPPG Pamulihan guna mengamati dinamika pelaksanaan kebijakan, interaksi antaraktor, dan proses pelayanan gizi. Ketiga, Studi Dokumentasi melalui penelaahan dokumen kebijakan, laporan, dan arsip kegiatan sebagai data pendukung. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik (Denzin, 2017) dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVivo12 sebagai alat bantu untuk mengelola dan menganalisis data kualitatif. Proses analisis dimulai dengan mengimpor data yang telah dikumpulkan, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, atau dokumen lainnya, ke dalam NVivo 12 Plus. Data tersebut kemudian ditelaah secara mendalam untuk mengidentifikasi kalimat, frasa, atau segmen yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahapan berikutnya adalah proses coding, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori atau tema yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kerangka teoritis penelitian (Sidik & Mulya, 2011).

Pamulihan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbatasan kuota, sumber daya makanan, dan kapasitas pelayanan menjadi hambatan struktural utama yang paling sering dihadapi petugas lapangan, sehingga memaksa mereka untuk terus-menerus melakukan rasionalisasi akses demi menjaga kelangsungan program. Area berwarna orange yang merepresentasikan *dimensi Controlling Clients and the Work Situation* menunjukkan proporsi kedua terbesar, mencerminkan tingginya penggunaan diskresi oleh petugas dalam mengatur perilaku penerima manfaat dan mengendalikan situasi kerja sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa petugas SPPG aktif menggunakan berbagai strategi pengendalian (penjadwalan, sanksi ringan, pengaturan antrean) agar pelaksanaan tetap terkendali di tengah tekanan permintaan yang tinggi. Dimensi *Client-Processing Mentality*, yang ditunjukkan oleh area berwarna biru muda, menempati posisi ketiga dan menggambarkan kecenderungan petugas untuk memandang serta memproses penerima manfaat secara rutin, seragam, dan mekanis. Dalam konteks *street-level bureaucracy*, pola pikir ini memperlihatkan adanya rutinitas birokratis yang cenderung mengutamakan efisiensi prosedural di atas pendekatan personal terhadap kebutuhan anak dan keluarga. Sementara itu, dimensi *Rationing Service: Inequality in Administration*, yang direpresentasikan oleh area berwarna abu-abu dengan proporsi terkecil, menunjukkan bahwa praktik ketidakadilan dalam penyelenggaraan relatif minim dan tidak menjadi isu dominan. Ketidak seimbangan yang ada lebih bersifat konsekuensi dari keterbatasan sumber daya secara umum daripada akibat diskresi petugas yang disengaja atau berbasis *favoritisme*, sehingga aspek ini menjadi yang paling lemah dalam temuan empirik penelitian ini. Visualisasi *Hierarchy Chart* dapat dilihat dalam gambar berikut: **Gambar 2**

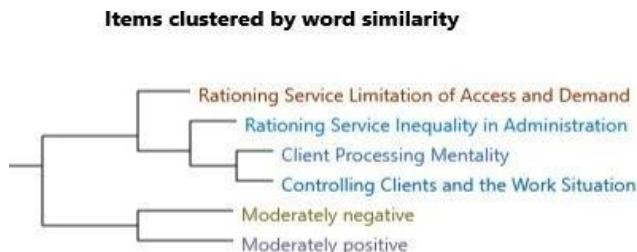


Gambar 2. Hierarchy Chart

Sumber: NVIVO12

Untuk melengkapi pembahasan, peneliti melakukan analisis dimensi dari teori *Street Level Bureaucrats* yang dikembangkan oleh Michael Lipsky (2010) dengan dimensi teori (1) *Rationing*

Service: Limitation of Access and Demand, (2) *Rationing Service: Inequality in Administration*, (3) *Controlling Clients and The Work Situation*, dan (4) *Client Processing Mentality* berdasarkan *Cluster by Word Similarity* yang dituangkan dalam gambar berikut: **Gambar 3.**



Gambar 3. Clustered by Word Similarity

Sumber: NVIVO12

Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara menggunakan *Tools NVivo12*, terpetakan dua klaster yang merepresentasikan tingkat implementasi dimensi dari teori *Street Level Bureaucrats* untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

Cluster 1: Rationing Service Limitation of Access and Demand

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan NVivo12 melalui visualisasi *clustered by word similarity*, dimensi *Rationing Service: Limitation of Access and Demand* muncul sebagai cluster yang paling konsisten menunjukkan implementasi yang efektif. Hal ini tercermin dari pola jawaban informan yang menekankan adanya kejelasan dalam kriteria penerima manfaat, ketepatan sasaran, serta mekanisme pendistribusian layanan yang relatif tertib. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Pamulihan telah memiliki prosedur seleksi penerima manfaat yang transparan, terutama dengan mengutamakan peserta didik dari keluarga kurang mampu serta kelompok rentan gizi. Data wawancara menunjukkan bahwa kriteria tersebut konsisten digunakan oleh petugas sejak tahap pendataan, verifikasi, hingga distribusi makanan.

Dengan demikian, cluster ini dikategorikan sebagai *Moderately Positive* karena sebagian besar elemen dimensi telah berjalan baik. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Lipsky (2010) yang menyatakan bahwa efektifnya rationing pada tingkat akses dan permintaan dapat terjadi apabila *street-level bureaucrats* memiliki pedoman pelaksanaan yang jelas sehingga mengurangi

ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Penelitian oleh Nugroho (2020) juga menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan pangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh adanya mekanisme demand management.

Cluster 2: Rationing Service Inequality in Administration, Client Processing Mentality dan Controlling Clients and at Work Situation

Berbeda dengan cluster pertama, hasil analisis NVivo menunjukkan bahwa tiga dimensi lain *Inequality in Administration, Client Processing Mentality, dan Controlling Clients and the Work Situation* terkelompok dalam cluster dengan kategori *Moderately Negative*. Kategori ini muncul karena meskipun implementasi telah berjalan, masih terdapat berbagai hambatan administratif, teknis, dan situasional yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Dimensi Rationing Service: Inequality in Administration, temuan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksamaan dalam penanganan administrasi antar sekolah yang menjadi lokasi distribusi. Perbedaan muncul dalam hal kecepatan pelaporan, kelengkapan data peserta, serta koordinasi antara pihak sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Informan menyebutkan bahwa sekolah tertentu lebih siap menyediakan data, sedangkan sekolah lain mengalami keterlambatan akibat sumber daya manusia yang terbatas. Kondisi ini mencerminkan bahwa street-level bureaucrats harus melakukan adaptasi berlebih untuk menjaga alur distribusi makanan. Penelitian oleh Maulana & Rukmini (2019) juga menemukan bahwa program bantuan sosial sering menghadapi ketimpangan administratif akibat perbedaan kapasitas institusi lokal, sehingga memengaruhi persepsi efektivitas program.

Dalam dimensi *Client Processing Mentality*, petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cenderung menunjukkan pola pemrosesan penerima manfaat yang lebih administratif daripada humanis, sebagaimana terlihat dari pilihan kata dalam hasil wawancara yang sering menekankan pendataan, berkas, dan verifikasi. Informan menggambarkan bahwa proses yang dilakukan masih fokus pada pemenuhan laporan dan persyaratan operasional, bukan pada pendekatan pelayanan yang bersifat dialogis atau clientcentered. Sejalan dengan penelitian *Tummers & Bekkers* (2014) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa birokrat garis depan cenderung mengembangkan client processing mentality ketika tuntutan pelaporan dan akuntabilitas administratif meningkat.

Selanjutnya dimensi *Controlling Clients and the Work Situation*, pengendalian terhadap dinamika penerima manfaat serta pengaruh kondisi kerja terhadap efektivitas program menjadi

komponen utama. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme kontrol dan pemantauan telah tersedia, lingkungan kerja tidak sepenuhnya mendukung pelaksanaannya secara optimal, sehingga memunculkan berbagai tantangan. Kondisi kerja tersebut menempatkan petugas pada posisi yang rentan terhadap kelelahan dan menurunkan kapasitas mereka dalam mempertahankan pengawasan yang efektif. Meskipun terdapat upaya untuk melaksanakan fungsi kontrol sesuai pedoman yang berlaku, berbagai keterbatasan operasional masih menghambat kualitas dan konsistensi implementasi kebijakan di lapangan.

Ketiga dimensi dalam *cluster 2* menggambarkan dinamika implementasi yang lebih kompleks dan sarat hambatan dibanding *cluster 1*. Hambatan tersebut meliputi ketidakseimbangan kapasitas administratif antar sekolah, dominasi pekerjaan administratif yang mengurangi kualitas interaksi dengan penerima manfaat, ketidakstabilan kondisi kerja sehingga memengaruhi kualitas layanan dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Sehingga dalam ketiga dimensi ini belum sepenuhnya efektif diimplementasikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Pamulihan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Efektivitas Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang melalui analisis NVivo12 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan pada dua tingkat efektivitas yang berbeda sesuai dimensi teori *Street-Level Bureaucrats*. Dalam dimensi *Rationing Service: Limitation of Access and Demand* terbukti paling efektif diimplementasikan. Hal ini menegaskan bahwa pengaturan akses dan permintaan merupakan aspek yang telah memenuhi ekspektasi efektivitas sebagaimana dirumuskan dalam tujuan penelitian. Selanjutnya tiga dimensi lainnya *Inequality in Administration*, *Client Processing Mentality*, dan *Controlling Clients and the Work Situation* menunjukkan efektivitas yang belum optimal. Secara keseluruhan, ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah berjalan, kualitas dan konsistensinya belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

Adapun saran dari penelitian ini yaitu diperlukannya, pertama penguatan kapasitas administratif sekolah dan SPPG dengan pelatihan teknis dan standarisasi mekanisme administrasi untuk memastikan seluruh sekolah memiliki kapasitas yang setara dalam pelaporan, pendataan, dan koordinasi distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua, petugas Satuan Pelayanan

Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu mendapat pendampingan atau *capacity building* mengenai pendekatan *client-centered service* agar proses pemrosesan penerima manfaat tidak hanya berorientasi administrasi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial. Ketiga penguatan monitoring dan evaluasi berbasis digital atau berbasis data terintegrasi dapat meningkatkan akurasi pendataan, kelancaran pelaporan, dan efektivitas pengawasan di lapangan. Adapun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi temuan. Pertama, penelitian hanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data utama berupa wawancara. Kedua, penelitian dilakukan pada satu lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga variabilitas kondisi antar wilayah tidak dapat sepenuhnya tergambarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Amril, A., & Sazali, H. (2025). Formulasi Regulasi dan Kebijakan Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Pembangunan: Studi pada Program Makan Bergizi Gratis. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(3), 1670–1679. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1566>
- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>
- Cresswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315134543>
- Febryanti, I., Indiati, I., Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)(STUDI KASUS PADA SDN 3 KEPANJEN KABUPATEN MALANG. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 067–079. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>
- Lipsky, M. (2010). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. *Sage Journal*, 1, 145–146. <https://doi.org/10.2307/1960475>
- Nugroho, A. P. (2020). Potensi Diskresi Street Level Bureaucrat di Puskesmas dalam

- Implementasi Universal Health Coverage: Studi Kasus Puskesmas Krembangan Selatan, Surabaya. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 03(03), 138–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkki.36377>
- Rachmawati. (2025). Heboh Makanan Bergizi Gratis Berbau dan Basi di SMAN Jatinangor, Apa yang Terjadi? Kompas.Com. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/03/02/083800988/hebohmakanan-bergizi-gratis-berbau-dan-basi-di-sman-jatinangor-apa>
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855–2866. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/380>
- Setpres, B. (2025). Presiden Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis Adalah Investasi untuk Masa Depan Bangsa. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-program-makan-bergizi-gratisadalah-investasi-untuk-masa-depan-bangsa/>
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy Implementation, Street-level Bureaucracy, and the Importance of Discretion. *Public Management Review*, 16(4), 527–547. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.841978>
- Wijaya, P. S. (2025). SPPG Menjadi Dapur Harapan untuk Masa Depan Anak Bangsa. Sumedangkab.Go.Id. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/sppg-menjadi-dapur-harapan-untuk-masa-depan-anakbangsa?utm>
- Yelvianti, T. (2025). Efektivitas Program Makan Gizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo terhadap Kualitas Gizi dan Pendidikan para Siswa di Indonesia. *Jurnal Sehat Mandiri*, 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.33761/jsm.v20i2.2030>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* W. Lawrence Neuman Seventh Edition (7th ed.).
- Schwandt, T. A. (1994). Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry. *Handbook of Qualitative Research*, January 1994, 118–137.